

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2017**

Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Mataram, 31 Desember 2017
Kepasa Pengguna Anggaran,

IR. WISNU HARYANA

N.P. 19641227 199603 1 001

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Telah Direviu

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I Laporan Realisasi Anggaran

II Neraca

III Laporan Operasional

IV Laporan Perubahan Ekuitas

V Catatan atas Laporan Keuangan

A Penjelasan Umum

B Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2 Belanja Pegawai

B.3 Belanja Barang

B.4 Belanja Modal

B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.4.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

B.4.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

C Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1 Aset Lancar

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

C.1.3 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

C.1.4 Persediaan

C.2 Aset Tetap

C.2.1 Tanah

C.2.2 Peralatan dan Mesin

C.2.3 Gedung dan Bangunan

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5 Konstruksi Dalam Pengerjaan

C.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3 Piutang Jangka Panjang

- C.4 Aset Lainnya
- C.5 Kewajiban Jangka Pendek
 - C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga
 - C.5.2 Uang Muka dari KPPN
- C.6 Ekuitas
 - C.6.1 Ekuitas
- D Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
 - D.2 Beban Pegawai
 - D.3 Beban Persediaan
 - D.4 Beban Barang dan Jasa
 - D.5 Beban Pemeliharaan
 - D.6 Beban Perjalanan Dinas
 - D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi
 - D.8 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1 Ekuitas Awal
 - E.2 Surplus/Defisit-LO
 - E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.4 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
 - E.4.1 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
 - E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan
 - E.4.3 Penyesuaian Nilai Aset
 - E.5 Transaksi Antar Entitas
 - E.5.1 Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar
 - E.6 Ekuitas Akhir
- F Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2 Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mataram, 31 Desember 2017

Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. VISNU HARYANA

NIP. 19641227 199603 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp572.732.791,00 atau mencapai 178.42% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp321.000.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2017 adalah sebesar Rp11.477.570.860,00 atau mencapai 98.04% dari alokasi anggaran sebesar Rp11.714.435.000,00

II Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2017.

Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp15.662.600.695,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp424.813.076,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp15.174.484.394,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp63.303.125,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp2.160.960,00 dan Rp15.660.439.635,00.

III Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp10.463.685.339,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp11.607.796.055,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-11.049.024.004,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp,00 dan Defisit Rp21.258.732,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-11.018.646.172,00.

IV Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp15.690.627.599,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-11.018.646.172,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai

Rp61.584.989,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp10.926.873.219,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp15.660.439.635,00.

V Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2017 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I MATARAM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016**

Uraian	Catatan	31 Desember 2017			31 Desember 2016
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	321.000.000,00	560.041.593,00	174,46	463.570.786,00
Jumlah Pendapatan		321.000.000,00	247.500.270,00	77,10	210.571.637,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.2	5.947.069.000,00	5.842.646.722,00	97,98	5.682.511.476,00
Belanja Barang	B.3	4.910.955.000,00	4.803.771.023,00	97,82	5.414.641.527,00
Belanja Modal	B.4	856.411.000,00	831.153.115,00	97,05	1.596.791.250,00
Jumlah Belanja		11.714.435.000,00	11.477.570.860,00	98,04	12.693.944.253,00

II. NERACA

BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I MATARAM
NERACA
PER 31 Desember 2017 dan 31 DESEMBER 2016

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	35.000,00	1.758.376,00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.3	12.900.142,00	3.307.775,00
Persediaan	C.1.4	411.877.934,00	364.365.578,00
Jumlah Aset Lancar		424.813.076,00	369.431.729,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1	2.639.407.040,00	2.639.407.040,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2	7.694.644.962,00	8.056.152.797,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3	11.519.252.990,00	11.124.573.240,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	862.330.930,00	759.036.030,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.5	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	C.2.6	-5.968.755.806,00	-5.901.483.709,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	C.2.6	-1.333.070.189,00	-1.059.950.713,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.6	-239.325.533,00	-247.802.318,00
Jumlah Aset Tetap		15.174.484.394,00	15.369.932.367,00
Aset Lainnya			
Aset Tak berwujud	C.4.1	6.115.000,00	6.115.000,00
Aset Lain-lain	C.4.2	688.304.250,00	
Akumulasi penyusutan/amortisasi Aset Lainnya		(631.116.125)	(1.528.750)
Jumlah Aset Lainnya		63.303.125,00	4.586.250,00
Jumlah Aset		15.662.600.595,00	15.743.950.346,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1	2.160.960,00	53.322.747,00
Uang Muka dari KPPN	C.5.2	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0,00	53.322.747,00
Jumlah Kewajiban		0,00	53.322.747,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.6.1	15.660.439.635,00	15.690.627.599,00
Jumlah Ekuitas		15.660.439.635,00	15.690.627.599,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		15.662.600.595,00	15.743.950.346,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I MATARAM
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016**

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	572.732.791,00	438.614.167,00
JUMLAH PENDAPATAN		572.732.791,00	438.614.167,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	5.793.598.722,00	5.731.559.476,00
Beban Persediaan	D.3	352.639.612,00	512.931.145,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	2.377.270.830,00	2.670.566.405,00
Beban Pemeliharaan	D.5	981.825.444,00	843.964.376,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.090.914.445,00	1.476.644.690,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	1.011.547.002,00	1.023.448.753,00
JUMLAH BEBAN		11.607.796.055,00	12.259.114.845,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-111.049.024.004,00	-11.820.500.678,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	0,00	8.000.000,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	0,00	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8	276.680.079,00	62.645.924,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8	246.302.247,00	59.205.154,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		30.377.832,00	11.440.770,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-11.018.646.172,00	-11.809.059.908,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I MATARAM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016**

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
EKUITAS AWAL	E.1	15.690.627.599,00	14.723.965.497,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	-11.018.646.172,00	-11.809.059.908,00
KOREKSI YG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YG AL BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	61.584.989,00	508.558.543,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	0.00	0.00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.1	43.662.789,00	503.059.543,00
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	17.922.200,00	5.499.000,00
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.3	0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	10.926.873.219,00	12.267.163.467,00
EKUITAS AKHIR		15.660.439.635,00	15.690.627.599,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram

Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Organisasi Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram dibentuk berdasarkan PERMENTAN NO.22/Permentan/OT.140/4/2008 tanggal 03 April 2008 yang merupakan penggabungan dari Balai Karantina hewan Kelas II Lembar dan Stasiun Karantina Tumbuhan Kelas I Lembar. Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram dipimpin oleh seorang Kepala Balai dengan dibantu oleh Sub.Bagian Tata Usaha, Seksi Karantina Hewan, Seksi Karantina Tumbuhan dan Seksi Pengawasan dan Penindakan. serta dalam melaksanakan penyelenggaraan karantina dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram memiliki wilayah kerja meliputi Pelabuhan Laut Lembar, Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Lombok, Bandara Internasional Lombok (BIL) dan Pelabuhan Pemenang, yang keseluruhannya didukung oleh 90 orang personil, yang terdiri dari :

- Pejabat Struktural : 5 Orang
- Pejabat Fungsional : 57 Orang
- Pengendali OPT Ahli : 10 Orang
- Pengendali OPT Terampil : 18 Orang
- Medik Veteriner : 11 Orang
- Paramedik Veteriner : 18 Orang
- Staf umum : 30 Orang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian NO.22/Permentan/ OT.140/4/2008 tanggal 03 April 2008, BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I MATARAM Kementerian Pertanian mempunyai tugas Melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.

Dalam melaksanakan tugasnya, BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I MATARAM menyelenggarakan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan
2. Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, per-lakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan Organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK)
3. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK
4. Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK
5. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati
6. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan
7. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati
8. Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi, dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan.

9. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati hewani dan nabati.

A.1.1. RUH, VISI DAN MISI

Ruh

Ruh penyelenggaraan pembangunan pertanian Indonesia yaitu Bersih dan Peduli. Bersih berarti bebas dari KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), amanah, transparan dan akuntabel. Peduli berarti memberikan fasilitasi pelayanan, perlindungan, pembelaan, pemberdayaan dan keberpihakan terhadap kepentingan umum (masyarakat pertanian) di atas kepentingan pribadi dan golongan (demokratis) dan aspiratif.

Visi

BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I MATARAM mempunyai Visi

“Terwujudnya Karantina Pertanian yang tangguh, dan terpercaya ”

Tangguh : Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram sebagai benteng terdepan harus mampu melindungi wilayah ini dari ancaman masuknya HPHK dan OPTK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, Pelaksanaan Karantina Pertanian harus jelas, tegas dan konsisten, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terpercaya : Jujur dan bertanggung jawab dan konsisten dalam pelaksanaan tugas serta transparan. Karantina Pertanian harus mempunyai integritas dan kompetensi yang tinggi pada tugas pokok dan fungsi, kreatif dan tanggap terhadap tuntutan publik, efisien dan efektif serta ilmiah dalam pelaksanaan setiap kegiatan

Misi

Untuk mencapai visi diatas, BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I MATARAM akan melaksanakan misi antara lain, yaitu :

1. Melindungi dan menyelamatkan kelestarian sumber daya alam hayati dan pertanian yang ada di lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram.
2. Mendukung keberhasilan program agribisnis dan ketahanan pangan nasional
3. Mengembangkan dan meningkatkan teknologi perkarantina nasional dalam rangka meningkatkan daya saing melalui standar sertifikasi karantina Internasional
4. Memfasilitasi kelancaran perdagangan / pemasaran agribisnis

Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sumber daya manusia yang profesional

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD .

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 Tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan .
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan .

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi .
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	321.000.000,00	321.000.000,00
Jumlah Pendapatan	321.000.000,00	321.000.000,00
Belanja		
Belanja Pegawai	5.015.069.000,00	5.947.069.000,00
Belanja Barang	4.910.955.000,00	4.910.955.000,00
Belanja Modal	856.411.000,00	856.411.000,00
Jumlah Belanja	10.782.435.000,00	11.714.435.000,00

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp560.041.593,00 atau mencapai 174,46% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp321.000.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2017		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			
Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	0,00	370.734,00	0,00
Pendapatan Jasa	321.000.000,00	560.041.593,00	174.46
Pendapatan Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan	0,00	83.100,00	0,00
Penerimaan kembali blj pegawai TYL	0,00	5.855.314,00	0,00
Penerimaan kembali blj modal TYL	0,00	6.382.050,00	0,00
Jumlah	321.000.000,00	12.237.364,00	174.46

Realisasi Pendapatan TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 15,72% dibandingkan TA 2016. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram adalah sebagai berikut:

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	.%
Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	370.734,00	0,00	0,00
Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya	0.00	8.000.000.00	0.00
Pendapatan Jasa	560.041.593,00	435.918.216,00	140.16
Pendapatan Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan	83.100,00	1.789.000,00	0,00
Penerimaan kembali blj pegawai TYL	5.855.314,00	0,00	0.00
Pendapatan tuntutan perbendaharaan	0,00	3.025.200,00	0.00
Penerimaan kembali blj modal TYL	6.382.050,00	14.838.370,00	0.00
Jumlah	12.237.364,00	14.838.370,00	17.70

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Realisasi Belanja pada TA 2017 adalah sebesar Rp11.477.570.860,00 atau 98,04% dari anggaran belanja sebesar Rp11.714.435.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2016

Uraian	2017		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	5.947.069.000,00	5.842.646.722,00	98.24
Belanja Barang	4.910.955.000,00	4.803.771.023,00	97.82
Belanja Modal	856.411.000,00	831.153.115,00	97,05
Total Belanja Kotor	11.714.435.000,00	11.477.570.860,00	98.04
Pengembalian Belanja		-6.702.330,00	0.00
Total Belanja	11.714.435.000,00	11.470.868.530,00	98,00

Dibandingkan dengan Tahun 2016, Realisasi Belanja TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 2% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya belanja pegawai yang meningkat gaji 14
2. Kenaikan Gaji Berkala dan,
3. Kenaikan pangkat

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	.%
Belanja Pegawai	5.842.646.722,00	5.682.511.476,00	55,61
Belanja Barang	4.803.771.023,00	5.414.641.527,00	42,17
Belanja Modal	831.153.115,00	1.596.791.250,00	97,05
Total Belanja	11.477.570.860,00	12.693.944.253,00	52,78

B.2 BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp5.842.646.722,00 dan Rp5.682.511.476,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 02.00% dari TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Adanya belanja pegawai yang meningkat gaji 14
- Kenaikan Gaji Berkala dan,
- Kenaikan pangkat

Kenaikan pangkat Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.537.592.722,00	5.468.466.476,00	55,61
Belanja Lembur	305.054.000,00	214.045.000,00	22,15
Jumlah Belanja Kotor	5.842.646.722,00	5.682.511.476,00	37,45
Pengembalian Belanja Pegawai	-5.359.330,00	-3.794.957,00	37,45
Jumlah Belanja	5.8373287.392,00	5.678.716.519,00	37,39

B.3 BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp4.803.771.023,00 dan Rp5.414.641.527,00. Realisasi belanja barang TA 2017 mengalami penurunan sebesar 20,68% dari TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

Adanya Penurunan pagu anggaran.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 30 Juni 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1.432.112.976,00	1.405.969.420,00	-11,24
Belanja Barang Non Operasional	295.767.098,00	638.076.488,00	0,38
Belanja Barang Persediaan	342.054.150,00	474.609.300,00	84,89
Belanja Jasa	661.096.910,00	691.286.802..00	52,05
Belanja Pemeliharaan	981.825.444,00	795.780.340,00	-3,02
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.090.914.445,00	1.476.732.690,00	50,84
Jumlah Belanja Kotor	4.803.771.023,00	5.414.729.527,00	20,68
Pengembalian Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	4.803.771.023,00	5.414.729.527,00	20,68

B.4 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.831.153.115,00 dan Rp.1.596.791.250,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2017 mengalami kenaikan/penurunan sebesar 38,65% dibandingkan TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- 1 Anggaran belanja modal telah selesai sampai dengan bulan Mei dan
- 2 Adanya pengurangan pagu anggaran belanja modal.

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	238.528.215,00	892.309.250,00	-40,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	417.403.000,00	596,542,000,00	-30,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	175.221.900,00	107,940,000,00	00,01
Jumlah Belanja Kotor	831.153.115,00	1,596,791,250,00	38,65
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	831.153.115,00	1,596,791,250,00	38,65

B.4.1 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp238.528.215,00 dan Rp397.105.500,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2017 mengalami penurunan sebesar -40,00% dibandingkan TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain oleh Pengurangan pagu / penurunan pagu belanja modal peralatan dan mesin

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 30 Juni 2017	Realisasi 30 Juni 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	238.528.215,00	397.105.500,00	-40,00
Jumlah Belanja Kotor	238.528.215,00	397.105.500,00	-40,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	238.528.215,00	397.105.500,00	-40,00

B.4.2 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp417.403.000,00 dan Rp596,542,000,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2017 mengalami kenaikan sebesar -30,00% dibandingkan TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain oleh

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	417.403.000,00	596,542,000,00	-30,00
Jumlah Belanja Kotor	417.403.000,00	596,542,000,00	-30,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	417.403.000,00	596,542,000,00	-30,00

B.4.3 BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp175.221.900,00 dan Rp107.940.000,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,1% dibandingkan TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain oleh

Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 30 Juni 2017	Realisasi 30 Juni 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	175.221.900,00	107,940,000.00	00.01
Jumlah Belanja Kotor	175.221.900,00	107,940,000.00	00.01
Pengembalian Belanja	0,00	0.00	0,00
Jumlah Belanja	175.221.900,00	107,940,000.00	00.01

C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 ASET LANCAR

C.1.1 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Rekening Bank	0.00	0.00
Uang Tunai	0.00	0.00
Jumlah	0.00	0.00

C.1.2 KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp35.000,00 dan Rp1.758.376,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Perbandingan Kas di Bendahara Penerimaan
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Saldo kas bendahara penerimaan	35.000.00	1.758.376.00
Penjelasan 2	0.00	0.00
dst..	0.00	0.00
Jumlah	0.00	0.00

C.1.3 BELANJA DIBAYAR DIMUKA (PREPAID)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp12.900.142,00 dan Rp3.307.775,00.

Perbandingan Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Belanja dibayar dimuka (prepaid)	12.900.142,00	3.307.775,00
Penjelasan 2	0,00	0,00
dst..	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

C.1.4 PERSEDIAAN

Saldo Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp411.877.934,00 dan Rp364.365.578,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Persediaan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Barang Konsumsi	411.877.934,00	364.365.578,00
Bahan Baku	0,00	0,00
Persediaan Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	411.877.934,00	364.365.578,00

C.2 ASET TETAP

C.2.1 TANAH

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.639.407.040,00 dan Rp2.639.407.040,00. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	2.639.407.040,00
Mutasi Tambah	
Saldo Awal	2.639.407.040,00
Saldo per 31 Desember 2017	2.639.407.040,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan tanah adalah berupa:

Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

No	Luas	Lokasi	Nilai
1.	407,00m2	Jl. Pelabuhan Laut Lembar NTB Rt.0, Lembar	44.240.000,00
2.	1.000,00m2	Jl. Pelabuhan Laut Lembar Rt.0, Lembar	150.000.000,00
3.	1.200,00m2	Rt.,	72.000.000,00
4.	530,00m2	Jl. R. Soeprpto No. 23 Ampenan NTB Rt.RT 004 / R, Ampenan Selatan	643.430.000,00
5.	471,00m2	Jl. Adi Sucipto Rt.0, Ampenan	262.950.000,00
6.	2.934,00m2	Jl. Raya Pelabuhan Lombok Rt., Pringgabaya	271.470.000,00
7.	10.010,00m2	Jl. Raya Pelabuhan No.9 Lembar Rt., Lembar	1.031.030.000,00
8.	425,00m2	Jl. Majapahit Gg. Bambu Runcing Ampenan Rt., Ampenan Selatan	116.050.000,00
9.	3.278,00m2	JL. KAYANGAN Rt.1, PRINGGABAYA	120.237.040,00
Jumlah			2.711.407.040,00

Nilai saldo Tanah pada Neraca SAIBA sama dengan nilai total KIB tanah pada aplikasi SIMAKBMN.

C.2.2 PERALATAN DAN MESIN

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp7.543.299.047,00 dan Rp7.543.299.047,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	8.056.152.797,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	238.528.215,00
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	0,00
Saldo per 31 Desember 2017	8.294.681.012,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	-5.653.590.815,00
Nilai Buku per 31 Desember 2017	7.694.644.962,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Alat pengolah data	Rp. 79.720.215.00.
2. Pengadaan alat teknis lapangan	Rp.22.550.000.00.
3. Pengadaan meubelair	Rp.91.510.000.00.
4. Pengadaan peralatan fasilitas gedung	Rp. 28.380.000.00
5. Pengadaan peralt dan fasilitas ktr lain	Rp.16.368.000.00

C.2.3 GEDUNG DAN BANGUNAN

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp11.519.252.990,00 dan Rp11.124.573.240,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	11.124.573.240,00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Masuk	0,00
Pengembangan Melalui KDP	417.403.000,00
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	0,00
Reklasifikasi Keluar	0,00
Saldo per 31 Desember 2017	11.519.252.990,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	-1.171.391.548,00
Nilai Buku per 31 Desember 2017	10.347.861.442,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa:

1 Pengembangan gedung ktr (partisi ruang kerja)	Rp. 24.740.000.00
2 Pengembangan gedung lab KT	Rp.137.010.000.00
3 Pengembangan gedung lab KH	Rp. 13.154.000.00
4 Pengembangan gedung lab KH	Rp. 28.703.000.00
5 Rehab kandang IKH	Rp.200.000.000.00
6 Pengembangan sarana gedung (tembok pbt)	Rp. 13.796.000.00

C.2.4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp862.330.930,00 dan 759.036.030,00. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	759.036.030,00
Mutasi Tambah	
Saldo Awal	759.036.030,00
Pembelian	175.221.900,00
Saldo per 31 Desember 2017	862.330.930,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	-239.325.533,00
Nilai Buku per 31 Desember 2017	862.330.930,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah berupa:

1 Pengembangan jaringan air	Rp. 9.884.000,00
2 Pengembangan saluran limbah	Rp.117.393.000,00
3 Penambahan daya jaringan listrik	Rp. 47.944.900,00

C.2.5 KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian lebih lanjut dari Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

C.2.6 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp-7.541.151.528,00 dan Rp-7.209.236.740,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	193.780.215,00	-5.968.755.806,00	7.694.644.962,00
2.	Gedung dan Bangunan	462.151.000,00	-1.333.070.189,00	11.519.252.990,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	175.221.900,00	-239.325.533,00	862.330.930,00
Akumulasi Penyusutan		831.153.115,00	-7.541.151.528,00	20.076.228.882,00

C.5 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.5.1 UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.160.960,00 dan Rp53.322.747,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	2.160.960,00	53.322.747,00
Jumlah	0,00	53.322.747,00

C.5.2 UANG MUKA DARI KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6 EKUITAS

C.6.1 EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp15.690.627.599,00 dan Rp16.195.474.268.00 Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp572.732.791,00 dan Rp463.570.786,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	.%
Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya	0.00	8.000.000.00	0.00
Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	370.734,00	0,00	0,00
Pendapatan Jasa	560.041.593,00	435.918.216,00	17,70
Pendapatan Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah	83.100,00	1.789.000,00	0,00
Pendapatan penyelesaian tuntutan perbendaharaan	0.00	3.025.200.00	
Penerimaan kembali blj modal TAYL	6.382.050.00	14.838.370.00	
Penerimaan kembalai blj pegawai TYL	5.855.314,00	0,00	0.00
	572.732.791.00	463.570.786	17.70

D.2 BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.5.793.598.722,00 dan Rp5.731.559.476,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Gaji Pokok PNS	3.715.827.500,00	3.700.439.800,00	50,83
Beban Pembulatan Gaji PNS	52.801,00	58.288,00	-41,19
Beban Tunj. Anak PNS	88.964.686,00	85.272.754,00	34,55

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Tunj. Beras PNS	235.799.520,00	234.640.800,00	-1,71
Beban Tunj. Fungsional PNS	440.326.000,00	447.660.000,00	37,73
Beban Tunj. PPh PNS	3.955.745,00	43.832.234,00	41,08
Beban Tunj. Struktural PNS	43.400.000,00	44.460.000,00	16,67
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	267.497.470,00	266.148.600,00	34,16
Beban Tunjangan Umum PNS	74.650.000,00	75.760.000,00	19,72
Beban Uang Lembur	305.054.000,00	214.045.000,00	22,15
Beban Uang Makan PNS	618.071.000,00	619.242.000,00	-4,58
Jumlah	5.793.598.722,00	5.731.559.476,00	37,39

Beban pegawai mengalami kenaikan dikarenakan adanya telah kembalinya pegawai yang melanjutkan studi S2

D.3 BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp352.639.612,00 dan Rp512.931.145,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Persediaan bahan baku	0,00	117.476.850,00	100,00
Beban Persediaan konsumsi	352.639.612,00	384.289.795,00	28,08
Beban persediaan lainnya	0,00	11.164.500,00	100,00
Jumlah	352.639.612,00	245.367.908,00	-228,08

D.4 BEBAN BARANG DAN JASA

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.377.270.830,00 dan Rp2.670.566.405,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa

per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Bahan	202.187.098,00	517.876.488,00	-60.95
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	193.800.000,00	172.950.000,00	12.05
Beban Honor Output Kegiatan	93.580.000,00	120.200.000,00	22.14
Beban Jasa Lainnya	61.130.000,00	38.324.600,00	59.50
Beban Jasa Profesi	26.900.000,00	79.042.000,00	-65.96
Beban Keperluan Perkantoran	1.019.580.006,00	1.040.910.126,00	-2.04
Beban Langganan Air	37.019.280,00	26.290.580,00	32.58
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	35.236.265,00	35.398.160,00	-0.45
Beban Langganan Listrik	281.317.681,00	279.032.726,00	0.81
Beban Langganan Telepon	116.626.857,00	135.735.474,00	-14.07
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	206.370.000,00	112.790.000,00	82.96
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12.362.970,00	11.593.781,00	6.63
Beban Sewa	91.160.673,00	100.422.470,00	3.62
Jumlah	2.377.270.830,00	2.670.566.405,00	32.53

D.5 BEBAN PEMELIHARAAN

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp981.825.444,00 dan Rp843.964.376,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	444.906.380,00	217.042.380,00	95.25
Beban Pemeliharaan Jaringan	53.806.350,00	46.801.710,00	14.96
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	483.112.714,00	482.389.630,00	0.14
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	38.725.000,00	-100,00
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0,00	17.232.536,00	-100,00
Beban Persediaan suku cadang	0,00	30.951.500,00	100,00
Jumlah	981.825.444,00	843.964.376,00	-189.63

D.6 BEBAN PERJALANAN DINAS

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.1.090.914.445,00 dan Rp.1.476.644.690,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Perjalanan Biasa	524.223.745,00	572.396.586,00	-8.41
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	126.140.000,00	399.010.000,00	-68.38
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	80.655.000,00	68.140.000,00	18.36
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	296.283.600,00	289.748.104,00	2.25
Beban Perjalanan Tetap	63.612.100,00	147.350.000,00	-56.82
Jumlah	1.090.914.445,00	1.476.644.690,00	-113.00

D.7 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.011.547.002,00 dan Rp1.023.448.753,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	323.357.280,00	351.238.836,00	-53.96
Beban Penyusutan Irigasi	8.218.046,00	5.207.967,00	-21.10
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	4.738.100,00	9.476.200,00	-50,00
Beban amortisasi software	1.528.750,00	764.375,00	0.00

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Penyusutan Jaringan	11.690.244,00	13.226.146,00	-55.80
Beban penyusutan asset tetap yg tdk digunakan dalam operasional pemerintah	22.337.500,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	639.677.082,00	643.535.229,00	49.57
Jumlah	1.011.547.002,00	1.023.448.753,00	-230.45

D.8 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00	0,00	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	246.302.247,00	10.727.634,00	2.195.96,00
Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara	0,00	3.025.200,00	100,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	264.442.715,00	44.782.354,00	470,14
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	8.000.000,00	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	6.382.050,00	14.838.370,00	56.98
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	5.855.314,00	0,00	0,00
Jumlah	522.982.326,00	81.373.558,00	2.923.08

E PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp15.690.627.599,00 dan Rp14.723.965.497,00.

E.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp-11.018.646.172,00 dan Rp-11.809.059.908,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp.61.584.989.00 dan Rp.508.558.543.00

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp61.584.989,00 dan Rp508.558.543,00.

E.4.1 KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp15.661.282.171,00 dan Rp.503.059.543,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2017.

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-1.333.070.189,00
Akumulasi Penyusutan Jaringan	-28.413.566,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-5.968.755.806,00
Gedung dan Bangunan	11.519.252.990,00
Jaringan	378.563.280,00
Peralatan dan Mesin	7.694.644.962,00
Tanah	2.639.407.040,00
Jumlah	15.661.282.171,00

E.4.2 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp17.922.200,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

incian Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2017.

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Suku Cadang	0,00
Jumlah	0,00

E.4.3 PENYESUAIAN NILAI ASET

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir

E.5 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp10.926.873.219,00 dan Rp12.267.163.467,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2017.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	11.477.570.860,00
Diterima dari Entitas Lain	-572.732.791,00
Transfer Masuk	22.035.150,00
Jumlah	10.926.873.219,00

E.5.1 DITERIMA DARI ENTITAS LAIN (DDEL)/DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2017 saldo DDEL adalah sebesar Rp-572.732.791,00 sedangkan DKEL sebesar Rp572.732.791,00.

E.5.2 TRANSFER MASUK/TRANSFER KELUAR

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp22.035.150,00 yang terdiri dari:

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp22.035.150,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2017.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Barang Konsumsi		22.035.150,00
Jumlah			22.035.150,00

E.6 EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp16.195.474.268,00 dan Rp15.690.627.599,00.

F PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Telah terjadi saldo penerimaan negara bukan pajak yang diterima pada tanggal 31 Desember 2017 dan disetor pada bulan Januari 2018 dengan perincian sebagai berikut:

NTPTN 11D307CBT8A24TJ0 tanggal 02-01-2018	Rp.20.000.00
NTPTN F09F0727RI2J6VJ8 tanggal 02-01-2018	Rp.10.000.00
NTPTN AD1432VCSS57GP60 tanggal 08-01-2018	Rp. 5.000.00

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Pengelola anggaran Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram adalah sebagai berikut :

1. Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. WISNU HARYANA
2. Bendahara Pengeluaran : Sri Suryani
3. Pejabat Pembuat Komitmen : Drh. I Made Nurata
4. Penguji dan Penerbit SPM : Aris Hadiyono,SP

Selama tahun 2017 telah dilakukan revisi DIPA maupun POK antara lain sebagai berikut :

- 1 DIPA awal Nomor : DIPA-018.12.2.499471/2017 tanggal 08-12-2016.
- 2 **DIPA Revisi 1** Nomor : DIPA-018.12.2.499471/2017 tanggal 03-02-2017
Pengesahan revisi 1 Nomor:S-234/WPB.22/2017 tanggal 03 -02 - 2017
- 3 **DIPA Revisi 2** Nomor : DIPA-018.12.2.499471/2017 tanggal 17-04-2017
Pengesahan revisi 2 Nomor:S-1408/WPB.22/2017 tanggal 17 -04- 2017
- 4 **DIPA Revisi 3 POK** Nomor : S-2600/WPB.22/2017 tanggal 12-07-2017
Pengesahan revisi 3 Nomor:S-2600/WPB.22/2017 tanggal 12 -07- 2017
- 5 **DIPA Revisi 4** Nomor : DIPA-018.12.2.499471/2017 tanggal 31-10-2017
- 6 **DIPA Revisi 5** Nomor : DIPA-018.12.2.499471/2017 tanggal 22-11-2017
Pengesahan revisi 5 Nomor:S-4668/WPB.22/2017 tanggal 22 – 11 - 2017
- 7 **DIPA Revisi 6** Nomor : DIPA-018.12.2.499471/2017 tanggal 07-12-2017
Pengesahan revisi 6 Nomor:S-4865/WPB.22/2017 tanggal 07 – 12 - 2017